

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dalam dunia bisnis sudah sangat pesat. Perkembangan ini tentu membutuhkan peranan akuntansi dalam mengambil sebuah keputusan untuk suatu perusahaan. Akuntansi sangat berperan penting di suatu perusahaan karena berkembangnya suatu perusahaan dapat dilihat dari proses akuntansi di perusahaan tersebut (Kurnia, 2023). Oleh sebab itu, informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan seharusnya perlu disajikan dalam sesuai dengan standar akuntansi agar informasi yang disajikan dapat berkualitas dan berguna bagi pengguna informasi akuntansi. Informasi akuntansi termuat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang diberikan kepada penggunanya mengenai keadaan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang berguna untuk bahan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tahun 2022, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi seberapa efektif dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap Perusahaan yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan atau dipublikasikan haruslah mengandung informasi yang sebenarnya. Jika laporan keuangan tidak disajikan dalam keadaan yang sebenarnya, maka tindakan tersebut akan merugikan dan menyesatkan para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam membuat keputusan.

Tindakan penyimpangan/kecurangan seringkali terjadi di dalam dunia bisnis. Salah satu tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan adalah dengan merekayasa atau mengubah data dalam laporan keuangan demi kepentingan pribadi maupun golongan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2022, kecurangan laporan keuangan adalah sebuah skema di mana karyawan dengan sengaja menyebabkan salah saji atau penghilangan informasi material dalam laporan keuangan perusahaan, misalnya dengan mengajukan laporan pengeluaran palsu. Selama masih banyak ditemukan kecurangan dalam laporan keuangan, topik ini masih menarik untuk dibicarakan (Handayani, 2020 dalam Kurnia, 2023).

(Gondokusumo, 2020) menjelaskan bahwa kasus Enron di tahun 2001 merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan energi ini berbasis di Houston, Texas, yang dibentuk pada tahun 1985 dan mengalami kebangkrutan pada tahun 2001 yang merugikan pemegang saham senilai US\$ 74 billion, dan ribuan investor serta pegawai kehilangan pekerjaan dan dana pensiunnya. Pada kasus Enron ini terjadi manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan yaitu senilai US\$ 600 juta, tetapi keadaan yang sebenarnya perusahaan ini mengalami kerugian. Keinginan perusahaan untuk mempertahankan

minat investor dalam sahamnya mendorong manipulasi keuntungan ini. Perusahaan kemudian mengalami kepailitan yang mengakibatkan kehancuran reputasi perusahaan di Amerika Serikat.

Tidak hanya di Amerika Serikat, manipulasi laporan keuangan ini juga terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya pernah terjadi pada PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) salah satu anak usaha dari Columbia Group yang merugikan 14 Bank hingga triliunan rupiah (Hukum Online.Com, 2018 dalam Pratiwi & Cahyadi, 2020). Selain itu terjadi juga pada PT. Kimia Farma Tbk (2001), PT. Indofarma Tbk (2004), PT. KAI Persero (2006), PT. Asuransi Jiwasraya (2015), PT. Inovisi Infracom Tbk (2015), PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (2019) dan PT. Garuda Indonesia Tbk (2019).

Pada tahun 2023, dunia bisnis kembali dihebohkan dengan berita terjadinya indikasi kecurangan laporan keuangan pada PT. Waskita Karya (WSKT) dan PT. Wijaya Karya (WIKA). Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mencurigai bahwa laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, juga dikenal sebagai Wika, telah dimanipulasi. Pada kuartal I tahun 2023, PT. Waskita Karya mencatat laba bruto sebesar Rp400,4 miliar, naik dari kuartal sebelumnya sebesar Rp329,6 miliar. Pada kuartal I tahun 2023, Waskita Karya mengalami rugi bersih sebesar Rp374,9 miliar, yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Ini lebih rendah dari rugi bersih sebesar Rp83,98 triliun pada kuartal I tahun 2022. Untuk kas dan setara kas, Waskita Karya turun dari Rp8,9 triliun pada kuartal I tahun 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada kuartal I tahun 2023. Pada kuartal I 2023, arus kas operasi Waskita Karya turun menjadi Rp467,6 miliar.

Angka ini meningkat dari kuartal I tahun 2022 yang menghasilkan kerugian Rp144,7 miliar. Sedangkan untuk PT. Wijaya Karya, mereka mencetak laba bersih sebesar Rp526,5 miliar, lebih banyak dari perolehannya pada kuartal I tahun 2022 sebesar Rp9,47 miliar. Perusahaan mengalami kerugian pada entitas asosiasi sebesar Rp13,9 miliar dan entitas ventura Bersama sebesar Rp55,5 miliar. Pada kuartal I tahun 2023, total liabilitas Wijaya Karya mencapai Rp55,76 triliun, lebih rendah dari kuartal I tahun 2022 yang mencapai Rp57,57 triliun. Sementara itu, kas dan setara kas Wika turun dari Rp5,66 triliun pada kuartal I tahun 2022 menjadi Rp2,22 triliun pada kuartal I tahun 2023. Selain itu, jumlah asset Wika pada kuartal I tahun 2023 adalah Rp72,73 triliun, turun dari Rp75,06 triliun pada kuartal I tahun 2022 (CNN Indonesia, 2023).

Sejak 08 Mei 2023, saham PT. Waskita Karya ditutup. Dan pada tanggal 18 Desember 2023, BEI juga memberhentikan perdagangan efek Wijaya Karya untuk sementara waktu. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan manajemen Wijaya Karya. PT. Wijaya karya ini akan menawarkan Rp92,23 miliar saham baru dengan harga Rp100 per lembar sebagai hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*). BEI telah mengingatkan tentang kemungkinan penghapusan pencatatan atau *delisting*. Untuk saham Waskita Karya yang telah disuspensi di seluruh pasar selama enam bulan, dan suspensi tersebut akan berlangsung selama dua puluh empat bulan pada tanggal 08 Mei 2025. Manajemen Waskita Karya mengatakan bahwa pengumuman tentang kemungkinan *delisting* akan menjadi bagian dari peraturan BEI. Setiap

emiten yang telah mengalami suspensi saham selama lebih dari enam bulan akan diberitahu tentang hal ini (kumparanBISNIS, 2024).

Maraknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Indonesia ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan belum berjalan dengan baik. Penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik seperti independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran menjadi salah satu upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan (Sanusi, Sutrisno, & Suwirno, 2019 dalam Halinah, 2021). Tata kelola perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen sehingga dapat membuat pengelolaan perusahaan lebih transparan untuk para pengguna laporan keuangan. Dalam pencapaian tersebut, maka diperlukan peran penting dari organ perusahaan seperti komite audit dan kedudukan kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional dapat memberikan dukungan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian dari organ Perusahaan, salah satunya yang penting yaitu komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepadanya untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris untuk mengawasi prosedur pelaporan keuangan manajemen untuk mencegah adanya kecurangan laporan keuangan. Hasil dari penelitian (Widowati & Oktoriza, 2021) menemukan bahwa komite audit yang diprosikan dengan jumlah anggota yang ada di komite audit tidak dapat mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Namun dalam

penelitian (Rengganis et al., 2019) menemukan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi tingkat kecurangan laporan keuangan.

Salah satu komponen penting dari tata kelola perusahaan yang baik adalah kepemilikan manajerial. Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial dapat berarti bahwa eksekutif perusahaan juga memiliki bagian dalam perusahaan (Rahayu, 2023). Jika pemegang saham berasal dari lingkungan internal perusahaan, maka mereka akan lebih memahami seberapa efektif pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian (A. A. Kurniawan et al., 2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, dalam penelitian (Kusuma & Fitriani, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan yaitu semakin tingginya presentase kepemilikan manajerial maka semakin rendah pula tingkat kecurangan laporan keuangan.

Selain kepemilikan manajerial, ada kepemilikan institusional yang merupakan proksi penting juga dalam tata kelola perusahaan. Jumlah saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan disebut dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah ketika perusahaan saham dimiliki oleh institusi atau Lembaga (Elisetiawati & Artinah, 2016 dalam Rahardjo & Wuryani, 2021). Dalam penelitian Kusuma & Fitriani (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, dalam penelitian (Kurnia, 2023) menemukan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh besar ataupun kecilnya ukuran perusahaan. Perusahaan besar memiliki lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil, sehingga lebih banyak informasi yang tersedia untuk perusahaan besar (Sari & Khafid, 2020 dalam Masfufah & Kiptiah, 2024). Akibatnya, perusahaan besar cenderung memiliki konflik kepentingan yang tinggi, maka dari itu manajemen yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertindak egois dengan mengubah atau memanipulasi laporan keuangan (Halimah, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya keinkonsistensian atas variabel yang diteliti di antara penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan beberapa variabel di penelitian sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian (Rahayu, 2023) mengenai Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Periode Terjadi Covid19 Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan Indonesia, dan penelitian (Indrasti, 2020) mengenai Peran Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Pada penelitian ini, menggunakan beberapa variabel yang terdapat di penelitian tersebut dengan perbedaan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi untuk pembeda dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar ukuran perusahaan dapat

menjadi variabel yang memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perusahaan perbankan dan pertambangan yang ada di Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena sektor manufaktur yang terdaftar di BEI memiliki keanekaragaman yang signifikan sehingga dapat menggambarkan keadaan perusahaan publik pada umumnya. Selain itu, tahun penelitian di penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian sebelumnya yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa fenomena kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Keinginan perusahaan untuk mempertahankan minat investor dalam sahamnya membuat perusahaan ingin memanipulasi laporan keuangan.

3. Penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik belum diterapkan secara maksimal di dalam perusahaan.
4. Terdapat keinkonsistensian penelitian-penelitian terdahulu sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel-variabel independen tersebut.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi didalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi?

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi?
7. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

7. Untuk membuktikan secara empiris apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
2. Menambah literatur Universitas Negeri Medan mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
3. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terutama mengenai kecurangan laporan keuangan yang di pengaruhi oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit yang di moderasi oleh ukuran perusahaan.